

**ANALISIS KEMANDIRIAN DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2015 – 2017**



Disusun Oleh:

Tony Ade Purwanto

153215598

**ANALISIS KEMANDIRIAN DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2015 – 2017**

Disusun Oleh:

Nama : Tony Ade Purwanto

Jurusan : Akuntansi

NIM : 153215598

Yogyakarta, 05 April 2019

Telah Disetujui dan Disahkan oleh

Dosen Pembimbing

Moh. Mahsun, SE, M.Si, Ak, CA, CPA, CFrA

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tony Ade Purwanto
NIM : 153215598
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan, bahwa Skripsi saya dengan judul:

“Analisis Kemandirian Daerah di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta PERIODE Tahun 2015 – 2017” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat saya terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di Perguruan tinggi STIE Widya Wiwaha maupun di masyarakat dan hukum negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Saya yang menyatakan,

Tony Ade Purwanto

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “Analisis Kemandirian Daerah di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2015 – 2017”.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi di Perguruan Tinggi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia, rezeki, dan kesempatan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan pendidikan.
2. Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Wakil Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
4. Dosen pembimbing saya bapak Moh. Mahsun, SE, M.Si, Ak, CA, CPA yang telah memberikan bimbingan serta memberikan kritik dan saran atas skripsi yang saya susun.

5. Seluruh Staf Dosen dan STIE Widya Wiwaha.
6. Kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya untuk kelancaran dalam mengerjakan skripsi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk Kakek dan Nenek saya yang telah menyemangati saya untuk segera cepat menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Untuk Kakak yang memberikan pengarahan, kepada saya agar cepat menyelesaikan pendidikan saya.
9. Untuk Saudara dan Sahabat saya yang memberikan saran, dan kritikan kepada saya atas pembuatan serta penulisan skripsi.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT.

Yogyakarta, 05 April 2019

Tony Ade Purwanto

MOTTO

1. “Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”. (Confusius)
2. “Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”. (Thomas Alva Edison)
3. “KEEP MOVING FORWARD”. (Walt Disney)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Ayah dan Ibu saya.
2. Kakek dan Nenek saya.
3. Kakak saya,
4. Saudara saya.
5. dan Sahabat saya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pertanyaan Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	7
B. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12
1. Ketentuan Umum	13
2. Pihak-Pihak Terkait	15

3. Langkah-Langkah Teknis	15
C. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah	21
1. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	22
2. Fokus Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	24
D. Rasio Kemandirian Daerah	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Teknik Pengumpulan Data	29
C. Teknik Analisis Data	31
BAB IV DATA & ANALISIS DATA	33
A. Data	33
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33
a) Tahun 2015	33
b) Tahun 2016	34
c) Tahun 2017	35
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	36
a) Tahun 2015	36
b) Tahun 2016	37
c) Tahun 2017	38
B. Analisis Data	39
1. Tahun 2015	39
2. Tahun 2016	40
3. Tahun 2017	41

C. Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah	42
1. DI. Yogyakarta	42
2. Kabupaten Kulonprogo	42
3. Kabupaten Bantul	43
4. Kabupaten Gunung Kidul	43
4. Kabupaten Sleman	44
5. Kota Yogyakarta	44
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Kritik dan Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Abstract

One of the successes of regional financial capacity in implementing regional autonomy is seen from the financial independence of the region. An area that is already independent in the financial aspect is expected to be able to carry out development and services to the community without expecting funds to be transferred from the central government.

Measurement of the level of independence of this area there are several theoretical bases needed to carry out such calculations such as the Regional Budget Revenue and Expenditure (APBD), the Process of Preparation of Regional Government Financial Reports, and Analysis of Regional Government Performance.

The process of measuring regional independence is carried out after calculating the original area, subsidies, and loans, these three data are the most important data in the calculation of regional independence ratio.

The formula used to measure regional independence is:

$$\text{Independence Ratio (IR)} = \frac{\text{Locally-generated Revenue}}{\text{Subsidy} + \text{Loan}}$$

Keywords: Analysis of Regional Independence in the Government of Yogyakarta Special Province Period 2015 - 2017.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan suatu instrument penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. SAPD merupakan alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri.

Pedoman SAPD menjelaskan siapa yang melakukan sekaligus menegaskan transaksi apa dicatat bagaimana. Pedoman ini dapat diuraikan dalam sebuah penjelasan langkah demi langkah yang dijelaskan melalui sebuah gambaran diskriptif atau bagan alir. Intinya SAPD merupakan suatu pedoman dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para petugas khususnya fungsi akuntansi.

Kuangan daerah menurut peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengertian Keuangan Daerah Menurut Halim (2004:15-16) Definisi APBD adalah suatu anggaran daerah, dimana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang akan dilaksanakan.

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 tahun.

Ketentuan mengenai keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Bab III Pasal 4 ayat (1), UU Nomor 33 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Artinya dana APBD diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, termasuk tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan yang sudah dilimpahkan atau yang sudah didesentralisasikan pusat ke daerah. Penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah. Sebaliknya, pengurangan wewenang akan mengurangi anggaran untuk itu. Selama ini pelaksanaan pemerintah di daerah sebagian besar dibiayai oleh pusat melalui bantuan pusat atau subsidi daerah otonom.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan, pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dalam pembangunan. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya.

Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula.

Menurut Mamesh dalam Halim (2004:18), “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang”, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keuangan daerah memiliki lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan, keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah, jadi manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Manajemen keuangan daerah pengelolaannya terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, dan kepengurusan khusus berkaitan dengan barang-barang inventaris kekayaan daerah. Manajemen keuangan daerah juga dapat pula dilihat dari segi tata usaha atau administrasi keuangan daerah.

Keuangan daerah mempunyai hak dan kewajiban, yang menjadi hak dari keuangan daerah adalah sumber-sumber yang dapat meningkatkan keuangan daerah dimana hak-hak daerah ini bersumber dari penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, ataupun hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain.

Kewajiban dari keuangan daerah yakni semua kewajiban mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

Adapun sumber-sumber penerimaan daerah yang lain terdiri dari:

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menacapai tujuan pemberian otonom kepada daerah. Dana Perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang dialokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Dalam Pasal 10 UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana perimbangan terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil.
- b. Dana Alokasi Umum.
- c. Dana Alokasi Khusus.

2. Pinjaman Daerah

Selama tiga dekade lebih pemerintahan orde baru, sumber utama pinjaman daerah berasal dari pinjaman dalam negeri. Jumlah pinjaman daerah selama ini rata-rata dibawah satu persen (1%) dari APBD.

Pinjaman yang dilakukan sebagian besar untuk mendukung kegiatan atau operasional perusahaan daerah (Badan Usaha Milik Daerah), pemerintah daerah pada masa lalu tidak dibenarkan melakukan pinjaman luar negeri.

3. Lain-lain penerimaan yang sah

Pendapatan lain-lain yang sah merupakan pendapatan yang didapat berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan.

Kemandirian daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menunjukkan berkembang yang baik dan sesuai sebagai daerah yang mandiri. Perkembangan tersebut

ditunjukkan dengan kenaikan RKD dari tahun ke tahun sehingga kemandirian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercermin secara jelas dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang efektif dan efisien.

Kemandirian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berbanding terbalik dengan beberapa daerah di Provinsi Yogyakarta yang masih belum mandiri dan masih harus melakukan perbaikan dalam upaya untuk melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga RKD yang dihasilkan oleh Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Bantul masih dibawah standar yang ditetapkan sebagai daerah yang mandiri dibandingkan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang sudah dapat ditetapkan sebagai daerah yang mandiri.

B. Rumusan Masalah

Tingkat kemandirian daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disinyalir masih belum diketahui secara optimal.

C. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana tingkat kemandirian daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis tingkat kemandirian daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2015 - 2017.

E. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Adapun manfaat akademis penulisan ini adalah untuk mengetahui kemandirian daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Praktis

Penulis berharap agar Penulisan Ilmiah ini dapat memberikan manfaat pemikiran berupa saran dan kritikan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengukur tingkat kemandirian daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut Halim dan Nasir (2006:44) Pengertian APBD adalah “Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Mardiasmo (2002:11) menyatakan, bahwa salah satu aspek terpenting dari suatu pemerintah daerah yang harus diatur dengan secara hati-hati ialah masalah pada pengelolaan keuangan dan juga anggaran daerah.

APBD terdiri atas:

1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 - b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
2. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

Unsur-unsur APBD adalah sebagai berikut:

- a. Rencana besarnya biaya belanja dan pendapatan.
- b. Terdapat perodesasi/jangka waktu yaitu 1 tahun.
- c. Disusun dengan sistematis:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja.
 - 2) Anggaran Belanja terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.
- d. Prosedur dalam penyusunan tertentu dalam proses mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan pra konsep oleh Eksekutif.
 - 2) Penyampaian ke DPRD.
 - 3) Pembahasan di DPRD.
 - 4) Penetapan Anggaran.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

1. Fungsi Otorisasi

Memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan, dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

2. Fungsi Perencanaan

Memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

Memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Fungsi Alokasi

Memiliki makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian daerah.

5. Fungsi Distribusi

Memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan.

6. Fungsi Stabilitas

Memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berikut ini adalah sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah (Subnasional) berdasarkan Peraturan Daerah:

1. User Charges (Retribusi)

Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia layanan publik, dan memastikan apa yang disediakan oleh penyedia layanan publik minimal sebesar tambahan biaya (Marginal Cost) bagi masyarakat.

Ada tiga jenis retribusi, antara lain:

a. Retribusi Perizinan Tertentu (Service Fees)

Seperti penerbitan surat izin (pernikahan, bisnis, dan kendaraan bermotor) dan berbagai macam biaya yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk

meningkatkan pelayanan. Pemberlakuan biaya/tarif kepada masyarakat atas sesuatu yang diperlakukan oleh hukum tidak sesuai rasional.

b. Retribusi Jasa Umum (Public Prices)

Penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barang pribadi, dan jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapat diidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarif atas fasilitas hiburan/rekreasi. Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkat kompetisi swasta, tanpa pajak, dan subsidi. Dimana itu merupakan cara yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi jika pajak subsidi dihitung secara terpisah.

c. Retribusi Jasa Usaha (Specific Benefit Charges)

Merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari pembayaran pajak yang kontras seperti pajak bahan bakar minyak atau pajak bumi dan bangunan.

2. Property Taxes (Pajak Bumi dan Bangunan)

Pajak Property (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah pada negara berkembang akan mampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan pajak property. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian penting dalam keuangan sektor jasa (contoh: pendidikan dan kesehatan) sebagaimana seharusnya mereka akan membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yang lebih elastis.

3. Excise Taxes (Pajak Cukai)

Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama pada alasan administrasi, dan efisiensi. Terutama cukai terhadap pajak kendaraan, pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap daripada yang biasanya terjadi di sebagian besar negara yaitu perspektif administrative berupa pajak bahan bakar dan pajak otomotif.

4. Personal Income Taxes (Pajak Penghasilan)

Diantara beberapa Negara dimana pemerintah subnasional memiliki peran pengeluaran besar, dan sebagian besar otonom fiscal adalah Negara-negara nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada sebuah flat, tingkat daerah didirikan pada basis pajak yang sama sebagai pajak pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, APBD terdiri atas 3 bagian, yaitu: "Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan".

Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeriksaan, serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggung jawaban APBD. Pertanggung jawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada menteri dalam negeri untuk pemerintah daerah tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintah Daerah Tingkat II, jadi pertanggungjawaban bersifat vertikal.

Dasar Hukum Keuangan Daerah dan APBD:

1. UU. No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Bad VIII, Pasal 78 s/d 86).

2. UU. No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. PP No. 105. Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.

B. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Proses penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memerlukan beberapa tahapan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Prosedur

Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait pada siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus tersebut tim penyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

2. Menentukan Pihak-Pihak Terkait

Setelah prosedur identifikasi, maka akan ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan.

3. Menentukan Dokumen Terkait

Setelah prosedur dan pihak yang terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus

menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.

4. Menentukan Jurnal Standar

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan, tim penyusun akan menelaah Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut maka tim penyusun menentukan jurnal debit dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat.

5. Menuangkannya dalam Langkah Teknis

Langkah terakhir dalam penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu diberikan pula ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan pada setiap bagian alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan.

“Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan menambahkan bagan alir dan ilustrasi soal atau transaksi beserta jawabannya”.

1) Ketentuan Umum

Laporan keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui proses akuntansi yang secara periodik dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD. Jurnal dan

posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 laporan keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD sebagai entitas akuntansi, yaitu:

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- b) Neraca.
- c) Laporan Operasional (LO).
- d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berikut ini proses penyusunan Laporan Keuangan PPKD:

1. Menyiapkan Kertas Kerja

- a) Mengisi Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian.
- b) Membuat Jurnal Penyesuaian.
- c) Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian.

2. Menyusun Laporan Keuangan

- a) Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA dan NS Setelah Penutupan LRA.
- b) Menyusun LO, membuat jurnal penutup LO dan NS Setelah Penutupan LO.
- c) Menyusun Neraca, membuat jurnal penutupan akhir dan NS akhir.
- d) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas.
- e) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah:

- a. Fungsi Akuntansi PPKD.
- b. PPKD.

3) Langkah-Langkah Teknis

a) Menyiapkan Kertas Kerja

Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Informasi minimal yang harus ada dalam format kertas kerja tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo (NS)		Penyesuaian		NS Setelah Penyesuaian	
		D	K	D	K	D	K

(1) Mengisi Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakan di kolom “NeracaSaldo” yang terdapat pada kertas kerja.

(2) Membuat Jurnal Penyesuaian

Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakan dalam kolom “Penyesuaian” yang erdapat paa kertas kerja.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- (a) Koreksi kesalahan/pemindah bukuan.
- (b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan.
- (c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau asset lainnya pada akhir tahun.

(3) Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraa saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakan pada kolom “Neraca Saldo Setelah Penyesuaian” yang terdapat pada kertas kerja.

b) Menyusun Laporan Keuangan

(1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran, membuat jurnal penutup LRA, dan NeracaSaldo setelah penutup LRA. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, fungsi akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam “Laporan Realisasi Anggaran”.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Jurnal penutup tersebut dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut:

(a) Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran yang dibuat di awal tahun anggaran.

Apropriasi Belanja	xxx	
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx
Estimasi Pendapatan		xxx
Estimasi Penerimaan Pembiayaan		xxx

(b) Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit-LRA.

Pendapatan-LRA	xxx	
Penerimaan Pembiayaan	xxx	
Belanja		xxx
Pengeluaran Pembiayaan		xxx
Surplus/Defisit-LRA		xxx

(c) Jurnal penutup untuk menutup akun surplus/defisit-LRA pada akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi.

Surplus/Defisit LRA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

Kemudian setelah membuat jurnal penutup, fungsi akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

(2) Menyusun LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO fungsi akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.

Berikut ini contoh jurnal penutup LO:

Pendapatan –LO	xxx	
Surplus/Defisit...-LO		xxx
Beban		xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, fungsi akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah penutupan LO.

- (3) Menyusun Neraca, jurnal penutupan akhir dan Neraca Saldo Akhir berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi akuntansi PPKD membuat Neraca beramaan dengan pembuatan Neraca, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal penutupan akhir untuk menutup akun “Surplus/Defisit...-LO” ke akun Ekuitas.

Berikut ini contoh jurnal penutup akhir:

Surplus/Defisit...-LO	xxx	
Ekuitas		xxx

Setelah membuat jurnal penutup akhir, fungsi akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi selanjutnya.

(4) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya, fungsi akuntansi PPKD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD.

(5) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

- f) Informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Informasi lainnya diperlukan untuk menyajikan yang wajar, tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

C. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja merupakan proses untuk mengukur kesesuaian realisasi dengan tujuan yang diterapkan. Tujuan suatu organisasi pada umumnya diturunkan dari perencanaan strategis, yaitu dimulai dari visi, misi, falsafah, dan kebijakan. Selanjutnya perumusan tujuan, sasaran, penyusunan program dan anggaran serta penetapan tugas dan fungsi harus mengacu pada perencanaan strategis yang sudah ditetapkan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus seluruh bidang tugas pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain (UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 7 ayat

- 1) Jadi secara umum tujuan Pemerintah Daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Mengumpulkan dan mengalokasikan/mendistribusikan sumber daya.

Beberapa hal yang menjadi tolak ukur untuk melakukan Analisis Kinerja Pemerintah Daerah:

1. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Pemda, meliputi indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcome, indikator benefit dan indikator impact.

a) Indikator Masukan

- (1) Jumlah dana yang dibutuhkan.
- (2) Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
- (3) Jumlah infrastuktur yang ada.
- (4) Jumlah waktu yang digunakan.

b) Indikator Proses

- (1) Ketaatan pada peraturan perundangan.
- (2) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

c) Indikator Output

- (1) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
- (2) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

d) Indikator Outcome

- (1) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan.
- (2) Produktivitas para karyawan atau pegawai.

e) Indikator Benefit

- (1) Tingkat kepuasan masyarakat.
- (2) Tingkat Partisipasi Masyarakat.

f) Indikator Impact

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(2) Peningkatan pendapatan masyarakat.

Karakteristik Pemda sebagai *Pure nonprofit organization* menempatkan organisasi ini mempunyai keunikan yang sangat berbeda dengan perusahaan bisnis. Pemda mempunyai tanggungjawab besar di bidang ekonomi dan sosial secara bersama.

Pengukuran kinerja Pemda harus mempertimbangkan indikator-indikator ekonomi dan sosial secara komperhensif yang mencakup:

a) Kondisi Ekonomi Nasional

- (1) Tingkat pertumbuhan produk domestik bruto.
- (2) Produk domestik bruto riil per kapita.
- (3) Tingkat tabungan.
- (4) Defisit/surplus keuangan daerah.
- (5) Utang dalam dan luar negeri.
- (6) Cadangan emas dan devisa.

b) Lingkungan Bisnis

- (1) Indeks kebebasan ekonomi.
- (2) Perlindungan hak milik.
- (3) Indeks persepsi korupsi.
- (4) Kebebasan bank.

c) Stabilitas dan Pengembangan

- (1) Sebaran pendapatan.
- (2) Tingkat pengangguran.
- (3) Paritas upah tenaga kerja pria/wanita.
- (4) Partisipasi politik.
- (5) Jumlah pengungsi.

- (6) Kepastian hukum.
- (7) Jumlah kendaraan pribadi dan umum.
- (8) Kondisi keamanan daerah.
- d) Kesehatan
 - (1) Tingkat kelahiran.
 - (2) Harapan hidup.
 - (3) Tingkat kematian.
 - (4) Program pemeliharaan kesehatan.
 - (5) Pengeluaran untuk kesehatan.
 - (6) Perbandingan penduduk dengan dokter/tenaga medis.
 - (7) Kecukupan gizi penduduk.
- e) Pendidikan
 - (1) Tingkat partisipasi pendidikan.
 - (2) Anggaran pendidikan.
 - (3) Kualitas tenaga pengajar.
 - (4) Kecukupan sarana dan prasarana pendidikan.
 - (5) Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat.
 - (6) Pemerataan pendidikan.

2. Fokus Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah diarahkan pada masing-masing Satuan Kerja (Dinas) yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap Satuan Kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan demikian perumusan indikator kinerja tidak bias seragam untuk ditetapkan pada semua Satuan Kerja yang ada. Namun demikian, dalam pengukuran

kinerja setiap Satuan Kerja ini harus tetap dimulai dari pengidentifikasian terhadap visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program-program dan anggaran serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja pemda berarti pengukuran kinerja terhadap Satuan Kerja atau entitas di lingkungan Pemda. Fokus pengukuran kinerja dapat untuk setiap Satuan Kerja atau entitas mencakup:

- a) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
- b) Tugas Pokok dan Fungsi.
- c) Struktur Organisasi dan Personalia.
- d) Program Kerja.
- e) Anggaran.

D. Rasio Kemandirian Daerah

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010 :142).

Formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian (RKD)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Subsidi} + \text{Pinjaman}}$$

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Bisma, 2010:77).

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan empat macam pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2004:188) yaitu:

1. Pola Hubungan Instrukturif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola Hubungan Delekatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

POLA HUBUNGAN DAN TINGKAT KEMAMPUAN DAERAH

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 0,25	Instruktif
Rendah	0,25 – 0,50	Konsultatif
Sedang	0,50 – 0,75	Partisipatif
Tinggi	0,75 - 1	Delegatif

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

Menurut Sugiyono (2003: 11) penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat kejelasan) dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Penelitian Diskriptif

Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sample yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Menurut Sugiyono (2003:14), terdapat beberapa jenis penelitian antara lain:

1. Penelitian Kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.
2. Penelitian Kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam satu penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian.

Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan penggunaan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian.

Dalam prakteknya, pengumpulan data ada yang dilaksanakan melalui pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dengan kondisi tersebut, pengertian pengumpulan data diartikan juga sebagai proses yang menggambarkan proses pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dapat dimaknai juga sebagai kegiatan peneliti dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (untuk penelitian kualitatif), atau menguji hipotesis (untuk penelitian kuantitatif).

Data juga dapat dibagi menjadi menjadi bermacam-macam klasifikasi. Tergantung dari jenis, teknik, kegunaan dan analisisnya. Seperti yang terangkum berikut ini:

1. Jenis Data Menurut Cara Memperolehnya

a. Data Primer

Data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti baik perorangan maupun organisasi. Contoh: Mewawancarai langsung penonton bioskop 21 untuk meneliti preferensi konsumen bioskop.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah.

Dalam penelitian, peneliti menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

2. Berdasarkan sumbernya

a. Data Internal

Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misalnya: data keuangan, data pegawai, data produksi.

b. Data Eksternal

Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk.

3. Klasifikasi Data Berdasarkan Jenis Datanya

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli saat hari raya Idul Adha, tinggi badan siswa kelas 3 IPS 2.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel.

Analisis data dilakukan dengan Analisis deskriptif dengan menjadikan praktik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan peraturan perundangan yang terkait.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat